

PEDOMAN TEKNIS PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN



DIREKTORAT PENGELOLAAN AIR IRIGASI
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2013

KATA PENGANTAR

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) merupakan mandat pengelolaan sistem irigasi nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. Dalam hal pengelolaan infrastruktur irigasi secara partisipatif pada jaringan irigasi tersier, secara teknis dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dimana pembinaan terhadap kelembagaan petani tersebut menjadi wewenang dan tanggung jawab dari instansi pemerintah yang menangani pertanian. Hal ini sejalan dengan mandat kementerian pertanian dalam pengelolaan irigasi tingkat usaha tani yang tertuang dalam PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pemberdayaan Kelembagaan Petani Pemakai Air ini memerlukan adanya perhatian dan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan irigasi partisipatif (pemerintah dan petani) mulai dari tahap perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sehingga tujuan akhir untuk mengoptimalkan pemanfaatan air irigasi yang efektif, efisien, dan berkelanjutan dapat diwujudkan serta upaya peningkatan produktivitas dan produksi pertanian serta kesejahteraan petani dapat tercapai.

Pedoman Teknis “Pemberdayaan Kelembagaan” diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelembagaan petani dan diharapkan dapat dijabarkan oleh Dinas Pertanian Provinsi dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)

dan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dalam bentuk Petunjuk Teknis (Juknis) dengan mempertimbangkan kondisi dan spesifikasi lokasi dimana kegiatan pemberdayaan ini dilakukan.

Jakarta, Januari 2013
Direktur Pengelolaan Air Irigasi



 Ir. Prasetyo Nuchsin, MM
NIP 19570903 198503 1 001

RINGKASAN

Penyelenggaraan Pemberdayaan Kelembagaan yang berbasis pada peran serta (partisipasi) petani dan kelompoknya dalam pengelolaan irigasi diharapkan dapat dilaksanakan sejak dari tahap pemikiran awal, perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan (operasional pemeliharaan) sampai dengan tahap monitoring dan evaluasi.

Lingkup kegiatan mencakup 2 jenis sub kegiatan yang terkait satu sama lain, yaitu : (1) Pemberdayaan Kelembagaan Petani Pemakai Air (P3A), terdiri dari Kegiatan Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan(PSETK); Penguatan Kelembagaan P3A dalam bentuk pelatihan/ workshop/sekolah lapang dan Fasilitasi Legalisasi Kelembagaan P3A yang dilaksanakan melalui pola swakelola oleh dinas kabupaten/kota dengan dana sebesar Rp. 20.000.000,-/ paket; (2) Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP), dilaksanakan melalui pola bansos dengan dana sebesar Rp. 60.000.000,-/paket, untuk pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana irigasi di tingkat usahatani (jaringan irigasi tersier, embung, irigasi pompa/pipanisasi dan lain-lain).

Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan TA 2013 akan dilaksanakan di 25 Provinsi, 248 kabupaten sebanyak 751 paket.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan	3
C. Sasaran.....	3
D. Pengertian atau Istilah	4
II. RUANG LINGKUP DAN METODE PELAKSANAAN KEGIATAN.....	7
A. Ruang Lingkup Kegiatan.....	7
1. Tahap Persiapan	7
2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan.....	10
B. Persyaratan Lokasi dan Petani/Kelompok (Penerima Bantuan Sosial).....	11
1. Persyaratan Lokasi	11
2. Persyaratan/ Kriteria Petani/ Kelompok P3A	12
C. Metode Pelaksanaan	14
D. Pembiayaan	15
III. PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)	16
A. Metode Pelaksanaan	16
B. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	16
1. Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknis dan Kelembagaan (PSETK).....	16
2. Pelatihan Penguatan Kelembagaan.....	18

3. Fasilitasi Legalisasi Kelembagaan P3A	20
C. Pendanaan.....	20
D. Laporan.....	21
IV. PENGEMBANGAN PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF (PIP).....	22
A. Metode Pelaksanaan Kegiatan	22
B. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	22
1. Perencanaan	22
2. Pelaksanaan Kegiatan Fisik.....	24
C. Pendanaan/Bentuk Belanja Bantuan Sosial (Bansos)	24
D. Laporan.....	25
V. INDIKATOR KINERJA.....	26
A. Keluaran.....	26
B. Hasil	26
C. Manfaat.....	27
D. Dampak.....	27
VI. MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN PENGENDALIAN.....	28
A. Monitoring dan Evaluasi.....	28
B. Pelaporan.....	28
C. Pegendalian	30
VII. PENUTUP	35
LAMPIRAN.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Contoh Rencana Anggaran Biaya
- Lampiran 2. Form Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)
- Lampiran 3. Contoh Profil Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Irigasi Partisipatif (PIP)
- Lampiran 4. Form Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian T.A 2013 (untuk Kabupaten/Kota)
- Lampiran 5. Form Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Pertanian T.A 2013 (untuk Provinsi)
- Lampiran 6. Out Line laporan Akhir
- Lampiran 7. Silabus Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A
- Lampiran 8. Check List Pengendalian Internal Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Tingkat Pusat
- Lampiran 9. Check List Pengendalian Internal Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Tingkat Propinsi
- Lampiran 10. Check List Pengendalian Internal Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Tingkat Kabupaten
- Lampiran 11. Form Laporan Pengendalian Internal Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Tingkat Pusat
- Lampiran 12. Form Laporan Pengendalian Internal Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Tingkat Propinsi
- Lampiran 13. Form Laporan Pengendalian Internal Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Tingkat Kabupaten
- Lampiran 14. Lokasi Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan TA. 2013

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sistem irigasi di tingkat usahatani telah ditetapkan dalam 2 (dua) landasan hukum yaitu UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. Pada kedua landasan hukum tersebut, ditekankan bahwa “pengembangan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air“. Artinya, segala tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di tingkat tersier menjadi tanggung jawab lembaga Perkumpulan Petani Pemakai Air/P3A (pada beberapa daerah dikenal dengan Mitra Cai, Subak, HIPPA, dll.) termasuk perkumpulan petani pemakai air tanah/P3AT. Untuk itu, diperlukan kelembagaan P3A yang kuat, mandiri, dan berdaya sehingga pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan, dan pada akhirnya mampu meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.

Pentingnya penguatan atau pemberdayaan P3A diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor. 38 Tahun 2007 yang

mengamanatkan bahwa pembinaan P3A menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian (dilaksanakan melalui Dinas Pertanian Kabupaten/Kota). Kementerian Pertanian, dalam hal ini Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) TA 2013 akan menyelenggarakan kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan dalam bentuk pengembangan serta rehabilitasi sarana dan prasarana irigasi (konstruksi fisik) dan pelatihan penguatan bagi kelembagaan petani pemakai air.

Implementasinya di tingkat lapangan akan diwujudkan melalui pelaksanaan pengelolaan irigasi partisipatif yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada petani sebagai pemakai air irigasi (diselenggarakan dengan prinsip satu sistem irigasi). Peran serta petani dalam pengelolaan irigasi dapat semakin ditingkatkan (dilakukan dalam setiap tahapan kegiatan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi, pemanfaatan hasil, dan pembiayaannya), sehingga petani mempunyai rasa memiliki dan rasa tanggung jawab (*sense of belonging and responsibility*) terhadap hasil pembangunan sarana dan prasarana irigasi tersebut. Dengan demikian, melalui kegiatan tersebut diharapkan mampu menciptakan P3A yang kuat dan mandiri sekaligus menjadi penopang pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah perdesaan.

B. Tujuan

1. Mengembangkan kapasitas dan kemampuan P3A dalam pengelolaan/pengembangan sarana dan prasarana irigasi secara partisipatif, untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar akan air irigasi untuk pertaniannya, sehingga meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan petani;
2. Melalui penerapan pola partisipatif dalam pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana irigasi di tingkat usahatani (khususnya jaringan irigasi tersier), petani mampu meningkatkan rasa kebersamaan, rasa memiliki dan rasa tanggung jawab dari petani dan anggota P3A dalam pengelolaan irigasi yang lebih efisiensi, efektif, dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan kelembagaan petani pemakai air (P3A) yang kuat, mandiri, berkelanjutan dan mengakar di masyarakat, mampu merencanakan, melaksanakan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana irigasi tingkat usaha tani serta mengembangkan potensi sumber daya lokal untuk dapat meningkatkan produksi pertanian dan pendapatan petani.

C. Sasaran

Sasaran pelaksanaan kegiatan (penerima manfaat) adalah petani yang tergabung dalam kelembagaan petani pemakai air (seperti P3A/ P3AT/ Mitra Cai/ HIPPA) yang mengalami

kerusakan jaringan irigasi maupun infrastruktur penyediaan air irigasi lainnya sehingga kemampuan ekonominya menurun.

Khusus bagi petani yang mengembangkan komoditas hortikultura, perkebunan dan peternakan yang kelembagaan P3A belum terbentuk, maka kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh Kelompok Tani sesuai dengan komoditas masing-masing sambil mendorong segera terbentuknya kelembagaan P3A untuk pembinaan selanjutnya.

D. Pengertian atau Istilah

1. *Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)* adalah kelembagaan yang ditumbuhkan/dibentuk petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi, air permukaan, embung/ dam parit dan air tanah. P3A yang dimaksud dalam Pedoman Umum ini juga termasuk kelembagaan kelompok tani ternak, perkebunan dan hortikultura yang memanfaatkan air irigasi/ air tanah dangkal/ permukaan dan air hasil konservasi/ embung;

2. *Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A)* adalah gabungan beberapa kelembagaan P3A yang bersepakat bekerjasama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi

yang bertujuan untuk mempermudah pola koordinasi dan penyelenggaraan irigasi sekunder serta memperkuat posisi tawar petani pada usaha pertaniannya;

3. ***Pemberdayaan Kelembagaan Petani Pemakai Air***: adalah upaya penguatan dan peningkatan kemampuan dan kapasitas P3A maupun GP3A yang meliputi aspek kelembagaan, teknis usaha pertanian dan irigasi serta pembiayaan dengan dasar keberpihakan kepada petani melalui pembentukan, pelatihan, pendampingan dan menumbuhkembangkan partisipasi dalam upaya mencapai ketahanan pangan nasional;
4. ***Pengelolaan Irigasi Partisipatif*** adalah penyelenggaraan pengelolaan irigasi yang berbasis peran serta petani dalam proses penyelenggaraan sejak pemikiran awal, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pada tahap perencanaan, rehabilitasi, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, pengamanan dan konservasi.
5. ***Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan (PSETK)***: adalah analisis dan gambaran keadaan sosial ekonomi, teknis dan kelembagaan yang terdapat pada satu atau sebagian daerah irigasi dalam waktu tertentu.

6. Pendamping/ Pemandu Lapangan/ Fasilitator: tenaga yang ditunjuk dari dinas pertanian kabupaten/kota yang bertugas di lapangan yang terdiri atas unsur pertanian dan unsur lain dari kecamatan/desa yang mempunyai tugas pokok memfasilitasi pembinaan dan pemberdayaan P3A. Pendamping/ Pemandu Lapangan/Fasilitator dapat dipilih dari anggota masyarakat (perorangan), baik mahasiswa atau kontak tani atau perorangan lainnya yang berdedikasi tinggi dalam mengembangkan dan memotivasi masyarakat dalam pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air dan pengelolaan irigasi partisipatif.

II. RUANG LINGKUP DAN METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan mencakup 2 jenis sub-kegiatan yang saling terkait, yaitu :

- a. Pemberdayaan Kelembagaan Petani Pemakai Air (P3A).
- b. Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP)

Kegiatan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap oleh kelompok P3A sesuai dengan urutan-urutan yang akan ditentukan dalam Pedoman Teknis:

1. Tahap Persiapan

Sebagai persiapan awal pelaksanaan kegiatan, satker Dinas lingkup pertanian kabupaten/kota maupun kelompok petani penerima manfaat, melaksanakan tahapan persiapan sebagai berikut :

a. Satker Dinas Lingkup Pertanian

- 1) Pembuatan/Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan/ Juklak oleh dinas provinsi (penjabaran dari Pedoman Teknis Pusat) dan Petunjuk Teknis/Juknis oleh Kab/Kota (penjabaran dari Petunjuk Pelaksanaan dinas provinsi)

- 2) Melaksanakan koordinasi kegiatan dengan instansi terkait di kabupaten/kota termasuk aparat desa dan masyarakat sekitarnya.
- 3) Melaksanakan identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) sesuai dengan kriteria penerima manfaat oleh dinas/satker. Sebelum melakukan penentuan atau penetapan lokasi dan kelompok penerima manfaat, untuk mengidentifikasi kondisi dan potensi kelompok/lembaga petani pemakai air sehingga sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
- 4) Pemilihan Pendamping/Pemandu/Fasilitator
Pendamping/ Pemandu/ Fasilitator dapat dipilih dari anggota masyarakat (perorangan), baik mahasiswa atau kontak tani atau perorangan lainnya yang berdedikasi tinggi dalam mengembangkan dan memotivasi masyarakat dalam pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air dan pengelolaan irigasi partisipatif.
Pendamping/ Pemandu/ Fasilitator bertugas mendampingi kelompok P3A dalam sosialisasi kegiatan, dan mendampingi pelaksanaan kegiatan. Pemberdayaan Kelembagaan Petani Pemakai Air.

- 5) Sosialisasi Kegiatan di kelompok sasaran, dilaksanakan oleh Petugas dinas dan Pendamping/fasilitator.
- 6) Penetapan Lokasi dan Kelompok P3A sebagai pelaksana kegiatan.

Penetapan kelompok penerima manfaat ditetapkan atas dasar hasil identifikasi CP/CL sehingga kelompok penerima manfaat bantuan sosial adalah benar-benar merupakan kelompok yang membutuhkan bantuan sesuai dengan persyaratan sebagaimana tertuang dalam Pedoman Teknis.

Untuk legalitasnya (Surat Keputusan/SK) Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial ini ditetapkan melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah ada rekomendasi dari Kepala Dinas Kab/Kota.

b. Kelompok Penerima Manfaat

- 1) Pertemuan Kelompok yang dilaksanakan dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan.
- 2) Penyusunan RUKK

Dilakukan dengan melibatkan seluruh anggota dengan dibimbing/bekerjasama dengan satker Dinas lingkup pertanian atau instansi terkait. RUKK memuat secara terperinci tentang lokasi, jenis dan volume, kebutuhan

bahan/material rancangan teknis (desain sederhana) dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan, rencana anggaran biaya, dan sumber pembiayaan baik yang berasal dari bantuan pemerintah (APBN dan atau APBD) maupun sebagai partisipasi (*sharing*) masyarakat/petani.

3) **Pembukaan Rekening Kelompok**

Kelompok penerima manfaat yang telah ditetapkan membuat rekening (*joint account*) di bank terdekat untuk kepentingan transfer dana bantuan sosial ke kelompok tersebut.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

- a. **Kegiatan Pemberdayaan P3A** dilakukan dalam bentuk pelatihan/ workshop/ sekolah lapang. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dapat menggunakan metode FGD (*Focus Group Discussion*) untuk menggali akses, kontrol, partisipasi serta manfaat yang diperoleh dari petani, sehingga diharapkan proses keterlibatan mereka mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan PIP
- b. **Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP)** merupakan kegiatan rehabilitasi atau pembangunan jaringan irigasi tersier, pengembangan

irigasi air permukaan, pengembangan konservasi air dan pembangunan infrastruktur irigasi lainnya dengan pola partisipatif yang merupakan hasil dari pelatihan/workshop/ sekolah lapang.

B. Persyaratan Lokasi dan Petani/Kelompok (Penerima Bantuan Sosial)

1. Persyaratan Lokasi

Hal **yang harus** dipenuhi dalam pemilihan dan penetapan calon lokasi adalah:

- a. lokasi kegiatan tidak berada dalam satu desa dengan kegiatan lain yang dilakukan melalui pola bantuan sosial (BANSOS), seperti pengembangan jaringan irigasi (JITUT/JIDES), Embung/Dam Parit, Pengembangan Air Permukaan, dan lain-lain sehingga tidak menimbulkan rasa kecemburuan sosial dengan kelompok lainnya yang melaksanakan kegiatan dengan pola lainnya (misalnya kegiatan JITUT/JIDES, embung/dam parit, pengembangan air permukaan dan lain-lain selain mendapat bantuan bahan dan material juga disediakan insentif upah untuk tenaga kerja).
- b. Kegiatan PIP dilaksanakan di lokasi kelompok P3A yang telah mengikuti Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan P3A pada tahun anggaran 2013.

- c. Infrastruktur/ Jaringan irigasi di lokasi tersebut kurang berfungsi baik (rusak) atau belum terbangun seluruhnya
- d. Kegiatan PIP diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, produksi dan perluasan areal tanam atau Intensitas Pertanaman (IP)
- e. Infrastruktur yang dibangun berada pada lahan pertanian dan tidak ada rencana untuk alih fungsi lahan
- f. Lokasi tersebut mempunyai sumber air atau ketersediaan air yang cukup sehingga dapat dikelola secara berkelanjutan

2. Persyaratan/ Kriteria Petani/ Kelompok P3A

- a. Penerima manfaat adalah kelembagaan petani pemakai air dengan nama P3A/ GP3A/ IP3A, P3AT, HIPPA, Mitra Cai, Dharma Tirta atau dengan nama-nama generik lainnya sesuai di daerah masing-masing yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan/memanfaatkan air untuk usaha tani.
- b. Kelembagaan pemakai air yang selama ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan sumber air untuk usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan sesuai kebutuhan petani.

- c. Pada kegiatan di subsektor selain tanaman pangan, dapat diberikan kepada kelembagaan kelompok tani ternak, perkebunan dan hortikultura yang memanfaatkan air irigasi/ air tanah dangkal/ permukaan dan air hasil konservasi/ embung. Kelompok ini mempunyai tugas dan tanggung jawab utamanya adalah mengelola atau mengatur keberlangsungan penggunaan air bagi para anggotanya.

Kelompok sasaran penerima kegiatan PIP harus dapat dikembangkan menjadi kelembagaan petani pemakai air (P3A).

- d. Kelompok penerima manfaat tidak sedang mendapatkan program bantuan rehabilitasi/ pembangunan dari kegiatan pengelolaan air irigasi pada tahun anggaran yang sama.
- e. Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Petani Pemakai Air dilaksanakan pada satu Daerah Irigasi (DI) dan atau dalam 1 (satu) GP3A dimana peserta berasal dari perwakilan masing-masing P3A untuk dapat mengetahui dan memahami tentang pengelolaan irigasi dan pertanian. Salah satu P3A peserta pelatihan adalah P3A yang akan melaksanakan kegiatan PIP.

Bagi kelompok sasaran di subsektor selain Tanaman Pangan, peserta Pemberdayaan Kelembagaan Petani Pemakai Air jumlah kelompoknya dapat disesuaikan dengan keberadaan kelompok tani pengelola air yang ada.

- f. Fasilitasi Legalisasi Kelembagaan P3A diberikan pada kelompok yang melaksanakan kegiatan PIP. Jika kelompok yang melaksanakan PIP sudah berbadan hukum, maka fasilitasi legalisasi P3A diberikan kepada P3A peserta pelatihan yang belum berbadan hukum.

Pada kelompok selain tanaman pangan, jika belum menjadi Kelembagaan Petani Pemakai Air (P3A), harus sudah terbentuk sebagai P3A atau dengan nama generik lainnya sesuai dengan masing-masing daerah.

C. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode/pola bantuan sosial dan swakelola. Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan P3A dilaksanakan dengan pola swakelola Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sedang kegiatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP) dilaksanakan dengan pola bantuan sosial dan dilaksanakan secara swakelola oleh petani.

D. Pembiayaan

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut di atas disediakan dana tugas pembantuan (TP) melalui Mata Anggaran Kegiatan (MAK) atau AKUN Belanja Lembaga Sosial Lainnya biaya sebesar Rp. 80.000.000,- per paket. Biaya tersebut dipergunakan untuk: 1) kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan P3A sebesar Rp 20.000.000,- per paket; dan 2) kegiatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP) Rp 60.000.00,- per paket.

Untuk kegiatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP), dana sebesar Rp. 60.000.000,- seluruhnya untuk pembelian bahan-bahan yang diperlukan, dan tidak boleh untuk membiayai tenaga kerja.

III. PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)

A. Metode Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air (P3A) dilaksanakan secara swakelola oleh dinas lingkup pertanian kabupaten/kota.

Kegiatan Pemberdayaan dilaksanakan pada satu Daerah Irigasi (DI) dan atau dalam 1 (satu) GP3A dimana peserta berasal dari perwakilan masing-masing P3A untuk dapat mengikuti pelatihan sehingga dapat mengetahui dan memahami tentang pengelolaan irigasi secara partisipatif dan usaha pertanian. Salah satu P3A peserta pelatihan adalah P3A yang melaksanakan kegiatan PIP.

B. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

1. Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknis dan Kelembagaan (PSETK)

Profil Sosial Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan merupakan gambaran informasi atau data mengenai keadaan sosial, ekonomi, teknis dan kelembagaan pada suatu daerah irigasi yang dibutuhkan oleh kelembagaan pengelola Irigasi untuk

perencanaan program pemberdayaan P3A dalam meningkatkan kinerja pengelolaan irigasi partisipatif.

Penyusunan PSETK bertujuan untuk mengetahui kinerja pengelolaan irigasi partisipatif oleh P3A melalui upaya menggali permasalahan yang ada di masyarakat, identifikasi penyebab munculnya permasalahan, dan cara pemecahan masalah dengan menggunakan potensi sumber daya lokal.

Prinsip pelaksanaan inventarisasi jaringan untuk penyusunan PSETK adalah sebagai berikut :

- pemberdayaan kemampuan masyarakat sendiri;
- prioritas dengan batasan paling mudah, murah dan bermanfaat besar bagi masyarakat.

Pengumpulan data dan informasi tersebut dilaksanakan oleh P3A dan fasilitator, dengan hasil yang diperoleh adalah tentang :

- Kondisi sosio teknik jaringan irigasi;
- Kondisi kelembagaan yang ada;
- Kebutuhan pelatihan, berdasarkan kelas kemampuan P3A;
- Berbagai permasalahan dan cara mengatasinya;
- Prioritas pemberdayaan P3A.

Data dan informasi yang didapatkan dipergunakan untuk penyusunan program perencanaan partisipatif, pengembangan kelembagaan, kebutuhan pelatihan, serta penyusunan program tahunan pemberdayaan P3A dalam pengelolaan irigasi.

Kegiatan PSETK dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali pertemuan, dengan peserta maksimal 25 orang anggota P3A peserta Pemberdayaan Kelembagaan P3A, didampingi oleh fasilitator (pendamping) dan instruktur.

2. Pelatihan Penguatan Kelembagaan

Pelatihan dilaksanakan dengan strategi pembelajaran orang dewasa (Andragogi) pendekatan FGD (*Focus Group Discussion*) selama 2 (dua) hari pertemuan. Adapun materi yang diberikan adalah mencakup Aspek Teknik (irigasi maupun pertanian); Aspek Kelembagaan; Aspek Pembiayaan (sosial ekonomi). Dengan demikian, petani diharapkan mampu merencanakan, melaksanakan (mengembangkan dan mengelola), serta memelihara sarana dan prasarana irigasi. Materi yang harus diberikan pada pelatihan adalah sebagai berikut:

1. Kelembagaan P3A
 - a. Organisasi
 - b. Administrasi Organisasi

- c. Keuangan Organisasi, termasuk di dalamnya pembuatan laporan keuangan organisasi
2. Pembiayaan/Pendanaan
- a. Sumber-sumber pendanaan (informasi akses kredit pertanian)
 - b. Pemasaran Hasil
 - c. Informasi tentang Pengembangan Agribisnis
3. Aspek Teknis
- a. Teknis Irigasi
 - 1) Kebutuhan dan Cara Pemberian Air Irigasi tingkat usaha tani
 - 2) Operasi Jaringan Irigasi tingkat usaha tani
 - 3) Pemeliharaan Jaringan Irigasi tingkat usaha tani
 - b. Teknis Pertanian (sesuai dengan kebutuhan kelompok/subsektornya)
 - 1) Teknis pertanian hemat air (SRI atau PTT)
 - 2) Teknis pengendalian hama terpadu
 - 3) Teknis pertanian organik
 - 4) Teknis budidaya hortikultura, peternakan dan perkebunan (sesuai subsektor)

Serta materi lainnya sesuai dengan kebutuhan petani dan ketersediaan muatan lokal.

3. Fasilitas Legalisasi Kelembagaan P3A

Kegiatan ini bertujuan agar kelompok P3A dapat memperoleh badan hukum (status hukum), sehingga dapat memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam pengembangan usaha pertanian dalam rangka meningkatkan pendapatan petani.

Fasilitas Legalisasi Kelembagaan P3A diberikan pada kelompok yang melaksanakan kegiatan Pengembangan Pengelolaan irigasi Partisipatif (PIP). Jika kelompok yang melaksanakan PIP sudah berbadan hukum, maka Fasilitas Legalisasi diberikan kepada P3A peserta pelatihan yang belum berbadan hukum.

C. Pendanaan

Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan P3A didukung dengan ketersediaan dana di Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota sebesar Rp 20.000.000,- per paket. Dengan perincian Rp 19.000.000,- digunakan Pelatihan Penguatan Kelembagaan dan Penyusunan PSETK P3A/GP3A. Sedangkan Rp 1.000.000,- digunakan untuk Fasilitas Legalisasi Kelembagaan P3A. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan setempat, antara lain:

1. Pengadaan alat tulis kantor (ATK);
2. Konsumsi dalam pelaksanaan Pertemuan/ pelatihan/ workshop dapat dilaksanakan di kabupaten maupun di lapangan;

3. Fotocopy, dokumentasi, dan lain-lain;
4. Display/ Alat peraga/ modul/ dll
5. Penggandaan dan Penyusunan laporan;
6. Honor Narasumber/Instruktur dalam pelaksanaan pertemuan/
workshop/ pelatihan;
7. Honor dan Penggantian Transport Petugas dan peserta
(petugas daerah, narasumber/instruktur).

Contoh Rencana Anggaran Biaya dapat dilihat pada ***Lampiran 1 dan 2.***

D. Laporan

Laporan yang harus disusun setelah melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan P3A adalah:

1. Laporan Pelaksanaan Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A
2. Laporan Penyusunan PSETK

IV. PENGEMBANGAN PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF (PIP)

A. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode pelaksanaan kegiatan Pengembangan Irigasi Partisipatif dilakukan melalui transfer uang/dana bantuan sosial (bansos) kepada rekening/tabungan kelompok penerima manfaat dan selanjutnya secara bertahap akan dipergunakan untuk pembelian bahan sesuai dengan kebutuhan kelompok dan kondisi setempat.

B. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

1. Perencanaan

Usulan kegiatan kelompok didasarkan pada hasil PSETK pada kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan P3A yang dilakukan sebelum PIP.

a. Lokasi, Jenis, dan Volume Bahan/Material.

Dalam menyusun rencana usulan kegiatan, memuat secara jelas dan terperinci tentang lokasi, jenis dan volume bahan/material yang diperlukan, dan jenis dan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan, baik fisik maupun non fisik.

- b. Rancangan Teknis (Desain Sederhana).

Desain sederhana dimaksud disusun oleh petani/ kelompok P3A yang dibantu oleh Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota setempat.

- c. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan disusun secara lengkap dan jelas sejak dari tahap persiapan, penyusunan rencana, penyusunan desain sederhana, pengesahan rencana usulan kegiatan kelompok, penyediaan bahan/ material bangunan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, serta monitoring dan evaluasi.

- d. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) agar dilengkapi dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan disesuaikan dengan besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam RAB hendaknya dijelaskan komponen yang akan dibiayai melalui bantuan pemerintah (bansos) dan komponen lainnya yang merupakan partisipasi petani/ P3A. Partisipasi yang dimaksud di sini dapat berupa material atau tenaga kerja.

Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang telah disusun, harus mendapat persetujuan dari Tim Teknis yang dibentuk oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota setempat, serta disetujui/ diketahui oleh PPK setempat.

2. Pelaksanaan Kegiatan Fisik

Pelaksanaan kegiatan PIP dilakukan dengan swakelola oleh petani/P3A dengan jenis kegiatan yang dapat dipilih seperti Rehabilitasi/Pengembangan Jaringan Tersier dan atau Pembangunan Embung dan atau Pembangunan Dam Parit dan atau Pengembangan Sumber Air dan atau kegiatan pembangunan infrastruktur pertanian lainnya sesuai dengan kebutuhan kelompok. Pengadaan bahan atau material dilakukan langsung oleh kelompok P3A, dan pelaksanaan kegiatan konstruksi di lapangan ***tidak untuk dikontrakkan*** kepada pihak lain (dilaksanakan oleh pihak ketiga), tetapi dilakukan oleh kelompok P3A secara swakelola.

Pedoman Teknis yang digunakan untuk masing-masing kegiatan mengacu kepada Pedoman Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengelolaan Air Irigasi Tahun 2013.

C. Pendanaan/Bentuk Belanja Bantuan Sosial (Bansos)

Bentuk belanja bantuan sosial (bansos) disalurkan dalam bentuk uang yang digunakan oleh kelompok untuk pengadaan barang (material) secara swakelola.

Dana yang disediakan untuk kegiatan Pengembangan Pengelolaan Irigasi Partisipatif adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per paket. Dana tersebut ***tidak dibenarkan digunakan untuk insentif gaji/ upah/ honor, perjalanan/ pembinaan, tetapi hanya digunakan untuk pembelian/ pengadaan bahan atau material bangunan (semen, pasir, batu, kerikil, besi dan lain-lain).*** Pola yang digunakan untuk pencairan dana adalah melalui pola bansos dengan transfer uang ke rekening kelompok P3A. Pencairan dana ke kelompok P3A langsung ditransfer ke rekening kelompok P3A dan ***tidak dibenarkan*** ditransfer melalui unit kerja/kelembagaan lainnya.

D. Laporan

Setelah menyelesaikan kegiatan PIP, dinas pertanian kabupaten/kota selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan diharuskan menyusun Laporan Kegiatan PIP. Laporan diuraikan secara sistematis dan dilengkapi dengan foto dokumentasi mulai sebelum pelaksanaan fisik dilakukan (0%), tahap pelaksanaan (50%) dan selesai pelaksanaan kegiatan (100%) dengan masing-masing titik pengambilan foto yang sama setiap tahapan.

Bab pelaporan kegiatan ini secara lengkap akan dijelaskan pada Bab VI point B.

V. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja digunakan sebagai ukuran untuk menilai kinerja dan keberhasilan dari kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan, sebagai berikut :

A. Keluaran

- ◆ Meningkatnya peran serta/ petani dalam pembangunan/ pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana irigasi.
- ◆ Meningkatnya rasa kebersamaan, rasa memiliki dan rasa tanggung jawab dalam pengelolaan irigasi dari kelompok perkumpulan petani pengelola air.

B. Hasil

- ◆ Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam pengelolaan jaringan irigasi yang partisipatif;
- ◆ Terlaksananya kegiatan pengembangan jaringan irigasi, pengembangan irigasi air permukaan, pengembangan konservasi air, dan sarana pengelolaan air tingkat usaha tani lainnya;
- ◆ Tersusunnya Laporan Profil Sosial Ekonoomi Teknik dan Kelembagaan (PSETK) kelompok P3A

- ◆ Terlaksananya pelatihan/workshop/sekolah lapang tentang pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air (P3A).

C. Manfaat

- ◆ Meningkatkan kapasitas, kemandirian dan kemampuan petani dan kelompoknya dalam pengelolaan irigasi partisipatif;
- ◆ Meningkatnya fungsi layanan jaringan irigasi di tingkat usahatani, sehingga memberi kemudahan petani untuk memenuhi kebutuhan air irigasi.
- ◆ Meningkatnya produktivitas dan produksi pertanian melalui peningkatan Intensitas Pertanaman (IP) dan perluasan areal tanam (PAT) di tingkat usahatani.

D. Dampak

- ◆ Meningkatnya posisi tawar kelembagaan petani pemakai air dalam upaya dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
- ◆ Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani.

VI. MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN PENGENDALIAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh dinas pertanian provinsi dan kabupaten/kota serta petugas pusat. Evaluasi dilakukan sejak tahap persiapan sampai pada tahap konstruksi dengan cara membandingkan antara rencana usulan kegiatan yang telah ditetapkan dengan hasil pelaksanaan kegiatan di lapangan. Di dalam evaluasi diuraikan permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah, demikian halnya untuk indikator kegiatan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

B. Pelaporan

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan diharuskan menyusun dan mengirimkan laporan secara berkala ke Dinas Pertanian Provinsi dan Pusat. Laporan yang dimaksud adalah laporan perkembangan bulanan, triwulan dan laporan akhir.

1. Laporan Perkembangan Bulanan

Laporan perkembangan bulanan berisikan perkembangan pelaksanaan fisik dan keuangan yang telah dilaksanakan berdasarkan tahapan pelaksanaan kegiatan. Laporan

dimaksud secara rutin dikirimkan melalui pos atau melalui faxsimile atau e-mail ke Dinas Pertanian Provinsi dengan tembusan ke Pusat.

Format laporan perkembangan bulanan disesuaikan dengan format realisasi fisik dan keuangan kegiatan Direktorat Pengelolaan Air Irigasi *Lampiran - 4 (Form PSP-01) dan 5 (Form PSP-02)*.

2. Laporan Akhir

Laporan akhir diperlukan untuk mengetahui secara lengkap rencana yang telah disiapkan, pelaksanaan di lapangan, permasalahan dan pemecahan masalah yang telah dilakukan serta tindak lanjutnya, demikian halnya apa hasil dan manfaat kegiatan tersebut.

Dalam laporan akhir diuraikan secara sistematis dan dilengkapi dengan foto dokumentasi mulai sebelum pelaksanaan fisik dilakukan (0%), tahap pelaksanaan (50%) dan selesai pelaksanaan kegiatan (100%) dengan masing-masing titik pengambilan foto yang sama setiap tahapan.

3. Pelaporan Online

Pelaporan Perkembangan Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan juga bisa dilaporkan dengan menggunakan Sistem Informasi Statistik (SIS) yang bisa dilaporkan melalui web resmi [www. pla.deptan.go.id](http://www.pla.deptan.go.id)

4. Dampak Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Tahun Sebelumnya.

Untuk mengetahui dampak kegiatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, agar dilakukan pengamatan atau pemantauan dan dilaporkan hasilnya ke Dinas Pertanian Provinsi dan tembusan ke Pusat.

5. Profil Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan.

Di dalam laporan akhir harus dilampirkan profil kelompok pelaksana kegiatan Pengembangan Pengelolaan Irigasi Partisipatif. Profil tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kondisi kelompok maupun lokasi yang mendapatkan alokasi kegiatan Pengembangan Pengelolaan Irigasi Partisipatif TA 2013.

C. Pengendalian

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa setiap unit kerja lingkup Kementerian Pertanian perlu menyusun dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern dalam upaya untuk mencegah segala penyimpangan dan ketidakpatuhan serta senantiasa memenuhi prinsip *good governance*.

Pengendalian Intern Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dilakukan oleh Tim SPI tingkat Pusat, Propinsi sampai dengan tingkat Kabupaten untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar efektif, efisien dan akuntabel. Adapun tim tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tim/Pelaksana Sistem Pengendalian Intern

a. Tingkat Pusat/Direktorat

Tim pelaksana pengendalian tingkat pusat ditetapkan oleh Direktur Pengelolaan Air Irigasi dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Direktur Pengelolaan Air Irigasi

Ketua : Kasubdit

Sekretaris : Kasi

Anggota : 1.

2.

3. dst

b. Tingkat Dinas Propinsi

Tim pelaksana pengendalian tingkat Propinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Propinsi, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pertanian Propinsi

Ketua : Disesuaikan

Sekretaris : Disesuaikan

Anggota : Disesuaikan

c. Tingkat Dinas Kabupaten

Tim pelaksana pengendalian tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten

Ketua : Disesuaikan

Sekretaris : Disesuaikan

Anggota : Disesuaikan

2. Periode Pengendalian

Pelaksanaan Pengendalian mengikuti jadwal sebagai berikut:

Triwulan I : paling lambat akhir bulan Maret 2013

Triwulan II : paling lambat akhir bulan Juni 2013

Triwulan III : paling lambat akhir bulan September 2013

Triwulan IV : paling lambat pertengahan bulan Desember 2013

3. Mekanisme Pengendalian

Pelaksanaan pengendalian lingkup Direktorat Jenderal dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, propinsi dan kabupaten, adapun mekanisme pengendalian adalah sebagai berikut:

a. Tingkat Pusat

- 1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan unit kerja Eselon II di Pusat

- 2) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan tingkat Propinsi
- 3) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan tingkat Kabupaten

b. Tingkat Propinsi

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ditingkat Propinsi dan Kabupaten

c. Tingkat Kabupaten

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ditingkat Kabupaten dan Petani.

4. Instrumen Pengendalian

Untuk memudahkan pelaksanaan pengendalian maka menggunakan ceklist pengendalian seperti pada *Lampiran 8, 9 dan 10*.

5. Pelaporan

Penyampaian laporan pengendalian dilakukan secara berjenjang dari Kabupaten sampai ke Pusat. Untuk pelaporan pengendalian dari Propinsi ke Pusat supaya melampirkan juga laporan dari Kabupaten terdapat pada *Lampiran 11, 12 dan 13*.

Pelaporan mengikuti jadwal sebagai berikut:

- | | |
|--------------|---|
| Triwulan I | : Disampaikan minggu I bulan April 2013 |
| Triwulan II | : Disampaikan minggu I bulan Juli 2013 |
| Triwulan III | : Disampaikan minggu I bulan Oktober 2013 |
| Triwulan IV | : Disampaikan minggu I bulan Januari 2014 |

Laporan perkembangan bulanan, triwulan, laporan akhir dan laporan pengendalian dikirimkan ke Dinas Pertanian Provinsi dan Pusat, dengan alamat :

Direktorat Pengelolaan Air Irigasi

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Jl. Taman Margasatwa Nomor 3

Ragunan – Pasar Minggu

JAKARTA SELATAN 12550

Telp : 021 – 7805268

021 – 7823975

Fax : 021 – 7823975

VII. PENUTUP

Pedoman Teknis kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Melalui acuan ini, diharapkan pelaksanaan kegiatan di lapangan dapat terlaksana dengan baik.

Selanjutnya untuk lebih optimalnya pelaksanaan di tingkat lapangan ***Dinas Pertanian Provinsi secepatnya menjabarkan atau menindak lanjuti Pedoman Teknis ini ke dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menjabarkan lebih lanjut menjadi Petunjuk Teknis (JUKNIS)*** dengan mempertimbangkan faktor teknis dan spesifik lokasi.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Contoh Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan TA. 2013

A. Pemberdayaan Kelembagaan Petani Pemakai Air (P3A)					20.000.000
No	Jenis Pengeluaran	Volume	Satuan	Harga Sat (Rp)	Biaya (Rp)
1	Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknik dan Kelembagaan				1.600.000
	Belanja Bahan				
	- Konsumsi Pertemuan dalam rangka Pelaksanaan PSETK/Penelusuran Jaringan (1 hari x 30 org)	30	OH	25.000	750.000
	- Peralatan Pelaksanaan PSETK	1	PKT	350.000	350.000
	- Penggandaan dan Penyusunan Laporan PSETK	1	PKT	500.000	500.000
2	Pelatihan Penguatan Kelembagaan				18.400.000
	Belanja Bahan				
	- ATK dan Bahan Komputer	1	PKT	750.000	750.000
	- Konsumsi Pertemuan dalam rangka pelatihan penguatan kelembagaan (2 hari x 35 Org)	70	PKT	25.000	1.750.000
	- Fotocopy materi pelatihan (20 lbr x 25 Org x 2 hari)	1000	LBR	200	200.000
	- Display/Alat Peraga/Modul/dll	1	PKT	900.000	900.000
	- Perlengkapan Peserta (seminar kid)	25	Org	60.000	1.500.000
	- Penggandaan dan Penyusunan Laporan Pelatihan	1	PKT	500.000	500.000
	Belanja Jasa Profesi				
	- Honor Narasumber/Instruktur	16	OJ	300.000	4.800.000
	Honor yang Terkait dengan Output Kegiatan				
	- Honor Panitia (5 org x 2 hari)	10	OH	250.000	2.500.000
	- Honor Pendamping (3 org x 2 hari)	6	OH	200.000	1.200.000
	Belanja Perjalanan Lainnya				
	- Penggantian Transport Narasumber/Instruktur (2 org x 2 hari)	4	OH	150.000	600.000
	- Penggantian Transport Petugas/Panitia (5 org x 2 hari)	10	OH	100.000	1.000.000
	- Penggantian Transport Peserta (25 org x 2 hari)	50	OH	25.000	1.250.000
	- Penggantian Transport Pendamping (3 org x 2 hari)	6	OH	75.000	450.000
3	Legalisasi Kelembagaan P3A				
	- Fasilitasi Legalisasi Kelembagaan P3A	1	PKT	1.000.000	1.000.000
B. Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP) - Belanja Lembaga Sosial Lainnya					60.000.000,00
No	Jenis Pengeluaran	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp)	Biaya (Rp)
1	Bahan Material				60.000.000,00
	- Besi Tulang 6'	478	Batang	25.000,00	11.950.000,00
	- Pasir	35	m3	100.000,00	3.500.000,00
	- Batu Belah 15/20	80	m3	95.000,00	7.600.000,00
	- Portland cement (50 kg)	370	Zak	50.000,00	18.500.000,00
	- Kawat Ayam	780	m2	14.000,00	10.920.000,00
	- Kayu Begeging	3	m3	800.000,00	2.400.000,00
	- Paku biasa 2" - 5"	15	kg	8.600,00	130.000,00
	- Pintu Air Tipe C3	2	unit	2.500.000,00	5.000.000,00
JUMLAH TOTAL					80.000.000,00

Lampiran 2

Kelompok :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kab./Kota :
Provinsi :

REKAPITULASI RENCANA USULAN KELOMPOK/RENCANA USULAN BERSAMA

Kepada Yth :
 Kuasa Pengguna Anggaran
 Kab/Kota

Sesuai dengan Surat KeputusanNo.....tanggal.....tentang penentuan kelompok sasaran kegiatan.....dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan Sosial kepada petani sebesar Rp.....(terbilang.....) sesuai Rencana Usulan Kelompok (RUK) /Rencana Usulan Bersama (RUB) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sbb :

No.	Kegiatan	Biaya (rupiah)			
		Pemerintah		Partisipasi Masyarakat (Rp)	Jumlah (Rp)
		APBN (Rp)	APBD (Rp)		
1	2	3	4	5	6
	A. Bahan/Material				
	1.....				
	2.....				
	B. Tenaga Kerja	--			
	C. Dst...				
	Jumlah				

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor.....tanggal....., Dana Bantuan Sosial kelompok tersebut agar dipindahbukukan ke rekening petani/kelompok.....No. Rekening.....pada cabang/unit Bank.....di.....

MENYETUJUI

Ketua Tim Teknis,
Penanggung Jawab

Ketua/Kelompok,

.....
NIP

.....

MENGETAHUI/MENYETUJUI
Pejabat Pembuat Komitmen

.....
NIP

PROFIL
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF
TAHUN 2013 OLEH
KABUPATEN

1. Lokasi

- 1.1. Titik Koordinat :
- 1.2. Desa :
- 1.3. Kecamatan :
- 1.4. Daerah Irigasi :
- 1.5. Kabupaten :
- 1.6. Propinsi :

2. Pelaksana

- 2.1. Kelompok Tani :
- 2.2. Nama Ketua :
- 2.3. Jumlah Anggota :
- 2.4. Luas hamparan Kelompok :

3. Kegiatan yang dilaksanakan

4. Dampak Kegiatan

- 4.1. Luas Oncoran/Luas Areal : Sebelum : Ha
Sesudah : Ha
- 4.2. Intensitas Penanaman (IP) : Sebelum :
Sesudah :
- 4.3. Produktivitas : Sebelum : ton/Ha
Sesudah : ton/Ha

5. Dokumentasi

KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TA. 2013												
Dinas	:										
Kabupaten	:										
Provinsi	:										
Subsektor	:										
Program	:										
Bulan	:										
No	Aspek	Kegiatan	Pagu DIPA		Ralisasi				Lokasi Kegiatan			Keterangan
			Keuangan	Fisik	Keuangan		Fisik		Nama Kelompok	Desa/ Kecamatan	Koordinat	
			(Rp)	(unit)	Rp	(%)	(unit)	(%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.	PENGELOLAAN AIR	1. Pemberdayaan Kelembagaan										
	IRIGASI	2.										
	.											
	.											
	.											
	.											
	.											
	.	dst										
JUM LAH												
CATATAN:												
1 Laporan dikirim ke Dinas Provinsi terkait tembusan ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 5 setiap bulan												
2 Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a Kanpus Kementerian Pertanian Gd. D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan 12550												
Faks: 021-7816086 atau email: simonevpla@deptan.go.id												
Tembusan ke Direktorat Pengelolaan Air Irigasi JL. Taman Margasatwa No. 3, Ragunan-Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Fax: 021: 7823975												
3 Realisasi adalah realisasi kumulatif s/d bulan ini (bulan laporan)												
4 Kolom (13) dapat diisi serapan tenaga Kerja, dll												
*) Coret yang tidak perlu												
Penanggung Jawab Kegiatan Kabupaten												

FORM LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN										
KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TA. 2013										
Dinas	:								
Provinsi	:								
Subsektor	:								
Program	:								
Bulan	:								
No	Dinas Kabupaten/ Kota *)	Aspek	Kegiatan	Pagu DIPA		Ralisasi				Keterangan
				Keuangan	Fisik	Keuangan		Fisik		
				(Rp)	(unit)	Rp	(%)	(unit)	(%)	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	Dinas.....*)	PENGLOLAAN AIR	1. Pemberdayaan Kelembagaan							
	Kab/Kota.....	IRIGASI	2.							
			-							
			-							
			-							
			-							
			dst							
JUM LAH										
CATATAN:										
1 Laporan dikirim ke Dinas Provinsi terkait tembusan ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 5 setiap bulan										
2 Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a Kanpus Kementerian Pertanian Gd. D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan 12550										
Faks: 021-7816086 atau email: simonevpla@deptan.go.id										
Tembusan ke Direktorat Pengelolaan Air Irigasi JL. Taman Margasatwa No. 3, Ragunan-Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Fax: 021: 7823975										
3 Realisasi adalah realisasi kumulatif s/d bulan ini (bulan laporan)										
4 Kolom (11) dapat diisi serapan tenaga Kerja, dll										
*) Diisi nama Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan PSP										

OUT LINE LAPORAN AKHIR

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan dan Sasaran
- C. Kondisi Pertanian Kelompok
- D. Permasalahan yang dihadapi

II. RENCANA KEGIATAN

Rencana kegiatan yang ditetapkan bersama
(Lampirkan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok)

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Rencana dibandingkan dengan Realisasi
- B. Permasalahan
- C. Pemecahan Masalah
- D. Tindak Lanjut

IV. HASIL

V. MANFAAT

VI. DAMPAK

VII. KESIMPULAN DAN SARAN

LAMPIRAN

Foto Dokumentasi Pembangunan Fisik di Lapangan dan Dokumen Lainnya (Posisi fisik 0 %, 50 % dan 100 %).

Lampiran 8

CHECK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN TINGKAT PUSAT

DINAS PROPINSI :
TARGET : Paket (Rp.....)
PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV
NAMA PETUGAS : 1
: 2

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas Propinsi	Ada/Tidak
2	Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)	Ada/Tidak
3	Sudah ada SID (desain sederhana)Paket
4	Sudah ada SK penetapan lokasi / kelompok taniPakeT
5	Sudah transfer danaPaket, Rp.....
6	Sudah dicairkanPaket, Rp.....
7	Selesai pekerjaan fisik (konstruksi)Paket
8	Sudah dimanfaatkanPaket

Lampiran 9

CHECK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN TINGKAT PROPINSI

DINAS KABUPATEN :
TARGET : Paket (Rp.....)
PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV
NAMA PETUGAS : 1
: 2

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas Kabupaten	Ada / Tidak
2	Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)	Ada / Tidak
3	Sudah ada SID (desain sederhana)Paket
4	SK penetapan lokasi /kelompok tani oleh Kepala DinasPaket
5	Sudah transfer danaPaket, Rp.....
6	Sudah dicairkanPaket, Rp.....
7	Selesai pekerjaan fisik (konstruksi)Paket
8	Sudah dimanfaatkanPaket

Lampiran 10

CHECK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN TINGKAT KABUPATEN

KELOMPOK PENERIMA :
- NAMA KELOMPOK TANI / P3A :
- DESA :
- KECAMATAN :
TARGET : Paket (Rp.....)
PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV
NAMA PETUGAS (EVALUATOR) : 1
: 2
: 3

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Sudah ada SID (desain sederhana)	Sudah / Belum
2	SK penetapan lokasi / kelompok tani oleh Kepala Dinas	Sudah / Belum
3	Sudah transfer dana	Rp.....
4	Sudah dcairkan	Rp.....
5	Selesai pekerjaan fisik (konstruksi)%
6	Sudah dimanfaatkan	Sudah / Belum

Lampiran 11

FORM PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN TINGKAT PUSAT

INSTANSI :
TARGET PSA SELURUH PROPINSI : Paket (Rp.....)
PERIODE LAPORAN PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV

NO	URAIAN	KEADAAN
1	Satlak SPI Tk Dinas Pusat	Ada/tidak
2	Pedoman Teknis Pengembangan Sumber Air	Ada/tidak
3	Sudah ada SIDPaket
4	Sudah ada SK penetapan lokasi / kelompok taniPaket
5	Sudah transper dana kepada kelompok taniPaket, Rp.....
6	Sudah dcairkan kelompok taniPaket, Rp.....
7	Sudah selesai pekerjaan fisik (kontruksi)Paket
8	Sudah dimanfaatkanPaket

Direktur Pengelolaan Air Irigasi

(.....)

Lampiran 12

FORM PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN TINGKAT PROPINSI

NAMA DINAS PROPINSI :
TARGET PSA SELURUH PROPINSI : Paket (Rp.....)
PERIODE LAPORAN PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV

NO	URAIAN	KEADAAN
1	Satlak SPI di Dinas Propinsi	Ada / Tidak
2	Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)	Ada / Tidak
3	Sudah ada SID (desain sederhana)Paket
4	SK penetapan lokasi /kelompok tani oleh Kepala DinasPaket
5	Sudah transfer danaPaket, Rp.....
6	Sudah dicairkanPaket, Rp.....
7	Selesai pekerjaan fisik (konstruksi)Paket
8	Sudah dimanfaatkanPaket

Kepala Dinas.....

(.....)

Lampiran 13

FORM PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN TINGKAT KABUPATEN

NAMA DINAS KABUPATEN :
TARGET PSA SELURUH KABUPATEN : Paket (Rp.....)
PERIODE LAPORAN PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV

NO	URAIAN	KEADAAN
1	Satlak SPI Tk Dinas Kabupaten	Ada/tidak
2	Petunjuk Teknis	Ada/tidak
3	Sudah ada SID (desain sederhana)Paket
4	Sudah ada SK penetapan lokasi / kelompok taniPaket
5	Sudah transper dana kepada kelompok taniPaket, Rp.....
6	Sudah dicairkan kelompok taniPaket, Rp.....
7	Sudah selesai pekerjaan fisik (kontruksi)Paket
8	Sudah dimanfaatkanPaket

Kepala Dinas.....

(.....)

**LOKASI KEGIATAN
PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN TA 2013**

NO.	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI MENURUT SUB SEKTOR (Unit)				
		Total	TP	Horti	Bun	Nak
1	SUMUT	71	50	16	5	-
2	SUMBAR	36	24	6	1	5
3	JAMBI	25	16	2	7	-
4	SUMSEL	28	17	3	7	1
5	LAMPUNG	31	21	2	7	1
6	BENGKULU	13	8	2	3	-
7	RIAU	11	6	-	4	1
8	BANTEN	12	8	1	1	2
9	JABAR	48	41	5	2	-
10	JATENG	96	63	15	12	6
11	DIY	13	7	3	1	2
12	JATIM	103	70	19	9	5
13	BALI	24	16	2	-	6
14	KALBAR	15	13	-	2	-
15	KALTENG	5	5	-	-	-
16	KALSEL	25	17	1	7	-
17	KALTIM	21	13	-	8	-
18	SULUT	10	8	1	1	-
19	SULTENG	8	7	-	1	-
20	SULSEL	66	49	9	3	5
21	SULTRA	16	13	1	2	-
22	GORONTALO	12	10	-	1	1
23	NTB	25	17	-	2	6
24	NTT	26	16	-	2	8
25	SULBAR	10	9	1	-	-
	JUMLAH TOTAL	750	524	89	88	49

SILABUS PELATIHAN PENGUATAN KELEMBAGAAN P3A

HARI/ SESSION	MATERI/KEGIATAN	TUJUAN	PROSES
I			
1	KELEMBAGAAN		
	a. Organisasi, Administrasi, Keuangan Organisasi (Laporan Keuangan)	Membentuk kelembagaan P3A sebagai organisasi yang melembaga yang dapat mewujudkan fungsi dasarnya yaitu a) mendistribusikan air irigasi secara adil dan efisien; b) mengatasi konflik yang terjadi antara pemakai air secara adil; dan c) memelihara jaringan irigasi tersier/tingkat usaha tani, baik irigasi teknis maupun irigasi desa secara baik dan berkesinambungan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian organisasi P3A - Penyusunan kepengurusan secara demokratis; - Penataan organisasi, struktur organisasi & uraian tugas ; - Pembuatan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang disusun bersama dalam rapat anggota untuk ditaati bersama; - Pelaksanaan pertemuan/rapat anggota/rapat pengurus secara berkala dan berkesinambungan - Penyusunan Laporan Keuangan yang akuntabilitas
	b. Pemberdayaan Kelembagaan	meningkatkan keberdayaan dan kemandirian P3A sampai memiliki status hukum dan mempunyai kemampuan dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di bidang organisasi, teknis pertanian, dan jaringan irigasi	<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan P3A dalam menyusun rencana kerja dan evaluasi pelaksanaannya - Peningkatan kelembagaan P3A mendapatkan Status Hukum akte Notaris atau penetapan pengadilan negeri; - Pengembangan Pengelolaan Irigasi Partisipatif oleh P3A - Pengantar Profil Sosial Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan (PSETK)
2	PEMBIAYAAN/PENDANAAN		
	a. Sumber-Sumber Pendanaan (Iuran, Akses Kredit, DII)	Mengetahui sumber-sumber pendanaan bagi kelompok dalam melaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan manajemen keuangan dan pengembangan usaha ekonomi sesuai dengan

HARI/ SESSION	MATERI/KEGIATAN	TUJUAN	PROSES
		program kerja organisasi	<p>potensi daerahnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan tentang Iuran Pengelolaan Irigasi (IPI) - Menjelaskan tentang akses kredit pertanian yang dapat dimanfaatkan oleh petani
	b. Pemasaran Hasil (Sendiri & Kelompok)	Mengetahui metode pemasaran hasil pertanian untuk meningkatkan jaminan harga terhadap produk usaha tani	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan metode pemasaran hasil pertanian - Menjelaskan informasi pasar dan harga - Menjelaskan akses pemasaran hasil pertanian oleh kelompok
	c. Kemitraan Dan Agribisnis	Mengetahui manfaat kemitraan dan peluang-peluang untuk pelaksanaan Agribisnis sebagai upaya peningkatan pendapatan petani	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan peluang kemitraan dengan penyedia sarana produksi, pengolahan, pemasaran hasil dan atau permodalan - Membangun jejaring usaha ekonomi melalui kerjasama/kemitraan dengan pihak lain yang terkait dalam bentuk seperti: usaha kios sarana produksi, usaha penyewaan jasa alsintan, usaha penggilingan padi, dan lain – lain
II			
1	TEKNIS IRIGASI		
	a. Operasi Jaringan (Pembagian dan Pengaturan Air Irigasi)	Mengetahui kegiatan operasional jaringan irigasi tingkat usaha tani (saluran tersier dan kwarter)	<ul style="list-style-type: none"> - Pembacaan alat ukur debit yang sederhana - Cara penelusuran jaringan dan menghitung Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan pengelolaan AKNOP - Cara membagi air antar blok kwarter dalam sistem giliran atau golongan
	b. Pemeliharaan Jaringan	Mengetahui kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi tingkat usaha tani	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan rutin - Pemeliharaan periodik - Pemeliharaan insidental untuk perbaikan bersifat darurat

HARI/ SESSION	MATERI/KEGIATAN	TUJUAN	PROSES
	c. Rehab Jaringan Irigasi	Meningkatkan fungsi jaringan irigasi	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan prioritas kebutuhan rehab jaringan irigasi - Melalui, pembebasan lahan dimusyawarahkan dalam rapat anggota - Pelaksanaan konstruksi secara kontroktual /swakelola
	c. Penyelesaian Konflik Pembagian Air	Mengetahui cara penyelesaian konflik pembagian air	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pemahaman tentang ketersediaan dan alokasi air irigasi - Memberikan pemahaman tentang RTTD dan RTTG - Menjelaskan cara pembagian air yang adil dan merata sehingga tidak terjadi konflik antar petani
2	TEKNIS PERTANIAN/BUDIDAYA		
	a. Teknis Pertanian Hemat Air (SRI)	Mengetahui dan paham tentang teknis budidaya pertanian hemat air dan ramah lingkungan sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada petani untuk meningkatkan hasil produksi pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Penjelasan pentingnya sistem pertanian hemat air - Cara/metode pertanian hemat air
	b. Pengendalian Hama Terpadu (PHT)		<ul style="list-style-type: none"> - Penjelasan tentang pengendalian hama terpadu - Cara/metode pengendalian hama terpadu
	c. Pertanian Organik		<ul style="list-style-type: none"> - Penjelasan tentang pertanian organik - Cara/metode melaksanakan pertanian organik - Pasca panen hasil pertanian organik sehingga dapat memiliki nilai ekonomi lebih tinggi
	d. Teknik Budidaya (Hortikultura, Peternakan Dan Perkebunan)		<ul style="list-style-type: none"> - Penjelasan tentang teknik budidaya hortikultura/peternakan/perkebunan sehingga tercapai produksi yang tinggi